

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan telah diyakini sebagai salah satu aspek pembangunan bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan warga Negara yang handal profesional dan berdaya saing tinggi. Di samping itu, diyakini pula oleh berbagai bangsa bahwa pendidikan juga merupakan cara yang efektif sebagai proses *nation and character building*, yang sangat menentukan perjalanan dan regenerasi suatu bangsa. Pendidikan selalu menjadi topik diskusi yang hangat (*up-to-date topic of discussion*) bagi Negara-negara di penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu *developing country* telah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan, yang secara yuridis tercermin dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran (Pasal 1); pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 2). Disamping itu, masalah pendidikan juga tercermin dalam Rencana Strategis Depdiknas (2004-2009) yang merupakan landasan operasional dalam menjabarkan pendidikan ke dalam kebijakan pendidikan nasional dan program-program kegiatan yang merupakan refleksi dan *derived* dari tujuan Pendidikan Nasional.

Konsep Otonomi Daerah yang menjadi bagian kebijakan pemerintah sejak era reformasi telah menjadi agenda penting yang diterapkan dalam setiap bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah memberikan otonomi pada tingkat satuan pendidikan. Karena kepala sekolah adalah pihak yang mengetahui tentang permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Komite Sekolah sebagai wakil dari kepedulian masyarakat terhadap mutu sekolah yang memiliki peran penting dan mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dari kebutuhan yang diajukan masyarakat, (4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi, (5) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk peningkatan pendidikan yang bermutu, dan (6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan.

Indikator input pendidikan di tingkat persekolahan yaitu : (1) Memiliki kebijakan umum, (2) Tersedia sumber daya, (3) Memiliki harapan prestasi yang tinggi, (4) Berfokus pada Stokholder, dan (5) Input manajemen.

Indikator manajemen Berbasis Sekolah yaitu : (1) Efektivitas belajar mengajar, (2) kepemimpinan, (3) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (4) Sekolah memiliki budaya mutu (5) Sekolah memiliki team work yang kompak, (6) Sekolah memiliki kewenangan, (7) Partisipasi masyarakat, (8) Keterbukaan, (9) Kemauan untuk berubah, (10) Evaluasi dan perbaikan, (11) Responsive dan antiseptif, (12) Memiliki akuntabilitas, dan (13) Memiliki sustainabilitas.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti di atas, penelitian ini difokuskan pada kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat diidentifikasi pada tiga variable penelitian yang dapat diuraikan seperti di bawah ini :

1. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya yang komponennya meliputi :
  - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
  - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
  - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah
  - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan

- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan
  - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.
2. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar yang komponennya meliputi :
- a. Menyusun perencanaan sekolah
  - b. Mengelola kelembagaan sekolah
  - c. Menerapkan model kepemimpinan dalam pekerjaan
  - d. Mengelola tenaga kependidikan
  - e. Mengelola kesiswaan
  - f. Mengelola sarana dan prasarana
  - g. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
  - h. Mengelola kegiatan belajar mengajar
  - i. Mengelola ketatausahaan dan keuangan sekolah
3. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap kepemimpinan kepala, komponennya sejalan dengan peran dan fungsi komite sekolah yang meliputi :
- a. Sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
  - b. Sebagai badan pemberi dukungan (*suporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

- c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan.
  - d. Sebagai badan mediasi (*mediator agency*) antara pihak sekolah, pemerintah, legislative, dan masyarakat.
4. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Masalah mutu pembelajaran di sekolah dapat difokuskan pada :
- a. Mutu input pendidikan di sekolah
  - b. Mutu proses pendidikan di sekolah
  - c. Mutu output pendidikan di sekolah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah penelitian ini dapat difokuskan pada :

- 1) Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
- 2) Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
- 3) Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan umum tersebut dapat dirinci dalam tujuan khusus sebagai berikut :

- 1) Ingin mengetahui dan menganalisis gambaran nyata tentang kinerja komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya
- 2) Ingin mengetahui besarnya kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Ingin mengetahui besarnya kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diambil hikmahnya adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan tentang ilmu administrasi pendidikan baik pada tingkatan makro dalam administrasi pendidikan di lembaga birokrasi pendidikan,



maupun pada tingkatan mikro dalam administrasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Khususnya pada tingkat sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan model-model baru dalam kerjasama antara komite sekolah dan lembaga sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu hasil penelitian ini dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama antara komite sekolah dan kepala sekolah dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekolah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada sekolah, khususnya kepala sekolah agar dapat dan mau melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah melalui wadah independen yang bernama komite sekolah.
- b. Memberikan masukan kepada kepala sekolah dan komite sekolah dalam melakukan kerjasama untuk memajukan sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menggalang dukungan dan kepedulian masyarakat kepada sekolah.
- c. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pemerintah Daerah Otonomi yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memajukan lembaga pendidikan dalam semangat desentralisasi pendidikan yang harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara praktis, bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi umpan balik (*feedback*) yang diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus

evaluasi terhadap dampak dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi maupun upaya pencarian solusi agar implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

#### **F. Asumsi**

Asumsi yang mendasari penelitian tentang kontribusi kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah adalah bahwa peningkatan mutu pembelajaran itu dapat diwujudkan dengan kepemimpinan Kepala Sekolah yang visibel, yang mendapat dukungan dan kepedulian masyarakat sebagai *stakeholder* utama pendidikan. Komite sekolah sebagai lembaga independen yang mewadahi dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang secara terus menerus bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memajukan pendidikan. Yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Komite Sekolah yang telah hampir 7 tahun semenjak payung hukum yang mendasari pembentukan Komite Sekolah yaitu Permen 044/U/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditertibkan, dipandang sudah saatnya untuk diteliti dan diketahui keberhasilannya dalam implementasinya. Selanjutnya dalam Permen itu disebutkan bahwa : Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan dan efisiensi pengelolaan



pendidikan di satuan pendidikan...”. dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 bahwa “Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang semakin profesional yang telah dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mendorong supaya guru dan kepala sekolah semakin profesional, ditambah dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian sekolah melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan kurikulum KTSP. “Tugas utama yang diemban oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang berhubungan dengan visi, orientasi, dan strategi pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien, ...sebagai komitmen dalam meningkatkan mutu pembelajaran...”. (Syaiful Sagala: 2007:88). Isye Mulyani (2006:124) menyimpulkan bahwa “kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci utama untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang dalam hal ini akan meningkatkan pula mutu pembelajaran”.
3. Peningkatan mutu pembelajaran yang terus diupayakan oleh Pemerintah baik pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat satuan pendidikan. Peningkatan SDM kepala sekolah dan guru terus ditingkatkan melalui berbagai penataran dan diklat.

4. Wadah dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan semacam komite sekolah di Indonesia bukan hal baru, terutama untuk Sekolah Dasar, karena pada awal berdirinya sekolah dasar dibangun atas kerjasama masyarakat secara gotong royong. Munculnya sejatinya yaitu masyarakat”. (Suryadi, A : 2003), agar supaya masyarakat merasa memiliki sekolah yang ada di lingkungannya, serta memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan generasi muda di sekitarnya.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Perumusan hipotesis didasarkan kepada variabel-variabel penelitian yang akan dipelajari. “Hipotesis merupakan jawaban sementara atas jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan

1. Terdapat kontribusi yang signifikan dari kinerja komite sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya
2. Terdapat kontribusi yang signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya
3. Terdapat kontribusi yang signifikan dari kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya

Karena penelitian ini menggunakan sampel untuk menggambarkan populasi maka hipotesis penelitiannya dapat digambarkan dalam hipotesis statistik. Sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2008:96-97) "...hipotesis statistik itu ada, bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik". Apabila hipotesis penelitian seperti di atas digambarkan dalam bentuk hipotesis statistik adalah :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$$

Apabila pada penelitian ini hipotesis riset  $H_a$  ditolak pada tingkat signifikansi tertentu (5 persen atau 1 persen), maka hipotesis nihil  $H_0$  secara otomatis diterima, atau sebaliknya.

## H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru atau salah pengertian mengenai persoalan yang muncul dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis berusaha memaparkan definisi operasional mengenai variable-variabel yang diteliti sebagai berikut :

1. Kontribusi adalah pengaruh langsung yang disengaja atau sumbangan suatu kegiatan terhadap hasil dari suatu kegiatan. Atau kontribusi adalah pengaruh suatu pekerjaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang sedang dilaksanakan.
2. Kinerja adalah perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan. Kinerja dikatakan rendah apabila hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang dipergunakan. Kinerja

memiliki lima dimensi yaitu : (1) kualitas kerja, (2) tepat waktu, (3) inisiatif, (4) kemampuan, dan (5) komunikasi, (Sutisna, 2008L:21 dari Terry, 1998:43).

3. Kontribusi kinerja komite sekolah adalah besarnya pengaruh langsung dari kualitas kerja komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu sebagai badan pertimbangan, pendukung, mediator dan pengontrol, penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang seharusnya menambah kemajuan sekolah atau peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
4. “Kepemimpinan merupakan norma perilaku (style) yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain”. (Miptah Toha, 1995:49). Kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah norma perilaku atau cara seseorang dalam menggerakkan orang lain untuk bekerja sesuai dengan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinya.
5. Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pembelajaran dengan melalui jaringan komunikasi, motivasi, serta pendekatan-pendekatan persuasive yang dilandasi oleh ability dan skill. Komponen-komponen kepemimpinan kepala sekolah yang harus dimiliki dan dilaksanakan yaitu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan : a) penyusunan perencanaan sekolah, b) mengelola kelembagaan sekolah, c) menerapkan model kepemimpinan dalam pekerjaan, d) mengelola tenaga kependidikan, e) mengelola kesiswaan, f) mengelola sarana dan prasarana, g) mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, h) mengelola kegiatan belajar mengajar, i) mengelola ketatausahaan dan keuangan sekolah. Keberhasilan Kepala Sekolah dalam memimpin untuk melaksanakan pengelolaan tersebut di atas akan menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran.

6. “Mutu pembelajaran adalah perubahan proses dan hasil belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* pada saat itu” (Nana Karyana, 2007:23). Peningkatan mutu pembelajaran adalah peningkatan upaya proses dan pencapaian hasil belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan anak didik dan masyarakat sebagai pengguna pendidikan.

